

Biaya kepatuhan pajak: sudut pandang asimetris informasi

Rafi'i Habib Al Rasyid

Universitas Islam Indonesia
e-mail: rafihabibalrasyid12@gmail.com

Abstrak

Wajib pajak terbebani oleh pajak melebihi dari nominal yang seharusnya mereka tanggung. Ada biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*) yang harus ditanggung oleh wajib pajak sebagai akibat dari menjalankan ketentuan perpajakan. Studi terdahulu menemukan jika biaya ini muncul sebagai akibat dari kompleksnya sistem perpajakan (*tax complexity*). Namun penyebab lain dari biaya tersembunyi ini belum banyak dieksplorasi dan menyisakan gap yang harus tutup. Studi ini menggunakan sudut pandang *asymmetric information* sebagai pemicu dari *tax compliance cost* untuk memberi alternatif sudut pandang. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak dari *asymmetric information* terhadap *tax compliance cost*. Metode PLS SEM digunakan untuk membangun basis teoritis dan mengestimasi dampak dari *asymmetric information* terhadap *tax compliance cost*.

Kata kunci: *Asymmetric information, Taxation, Tax compliance cost*

DOI: [10.20885/ncaf.vol5.art34](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art34)

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tanpa mendapat imbalan kembali secara langsung. Kontribusi tersebut seharusnya hanya sebatas apa yang menjadi kewajiban dari wajib pajak dan hal tersebut di atur melalui undang-undang dibidang perpajakan. Namun disadari atau tidak faktanya wajib pajak turut menanggung beban lain di luar dari nominal pajak itu sendiri. Beban tersembunyi ini disebut sebagai *tax compliance cost* atau biaya kepatuhan pajak. *Tax compliance cost* didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan dan patuh pada ketentuan dibidang perpajakan (Musimenta, 2020).

Kebanyakan studi terdahulu berfokus pada *tax complexity* sebagai penyebab dari munculnya *tax compliance cost*. Namun satu hal yang luput dari perhatian adalah peran dari distribusi informasi. Padahal dalam konteks regulasi distribusi informasi memegang peran penting untuk menutup kesenjangan informasi di antara para pemangku kepentingan yang berpotensi memicu biaya. Distribusi informasi yang cacat dapat disebabkan oleh berbagai macam halangan (*informations barriers*). Kondisi ini mendorong para pihak berkepentingan masuk ke dalam kondisi keterpaparan informasi yang tidak seimbang yang mana satu pihak memiliki informasi lebih lengkap dan detail dibanding pihak lainnya kondisi ini disebut juga *asymmetric information* atau asimetris informasi (Lofgren et al., 2002).

Asymmetric information adalah isu yang selalu relevan dalam banyak konteks di kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kasus *asymmetric information* memberi konsekuensi yang merugikan seperti misalnya memicu biaya (Rundo & Di Stallo, 2019). Dalam konteks perpajakan isu asimetris informasi menjadi satu dari sekian banyak masalah yang mewarnai hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Bhalla & Sharma, 2022). Namun sejauh pengetahuan peneliti tidak ada studi terdahulu yang mengangkat isu asimetris informasi dalam kaitannya dengan biaya kepatuhan pajak. Maka dari itu dampak dari *asymmetric information* terhadap *tax compliance cost* menjadi sesuatu pembahasan yang perlu untuk di eksplorasi lebih lanjut. Sebagai upaya untuk mengeksplorasi isu tersebut studi ini merumuskan *research question* sebagai berikut:

RQ: Apakah dan dalam kondisi bagaimana *asymmetric information* memberikan dampak terhadap *tax compliance cost* ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut studi kali ini bertujuan menguji hubungan antara *asymmetric information* dan penyebabnya terhadap *tax compliance cost* dengan menggunakan analisis *multivariate*. Studi ini berkontribusi dua hal pada literatur penelitian dengan tema biaya kepatuhan pajak.

Pertama, studi ini menguji peran distribusi informasi terhadap biaya kepatuhan yang mana tidak banyak studi membahas hal ini. Kedua, studi ini menggunakan metode analisis *Partial Least Square Structured Equation Modeling* (PLS SEM) yang mana metode ini jarang digunakan sebagai metode analisis data literatur biaya kepatuhan pajak.

Struktur pembahasan dalam studi ini adalah tersaji sebagaimana berikut: bagian pertama adalah pendahuluan, bagian kedua adalah landasan teoritis, studi literatur, pengembangan hipotesis, dan model penelitian, bagian ketiga adalah metodologi penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

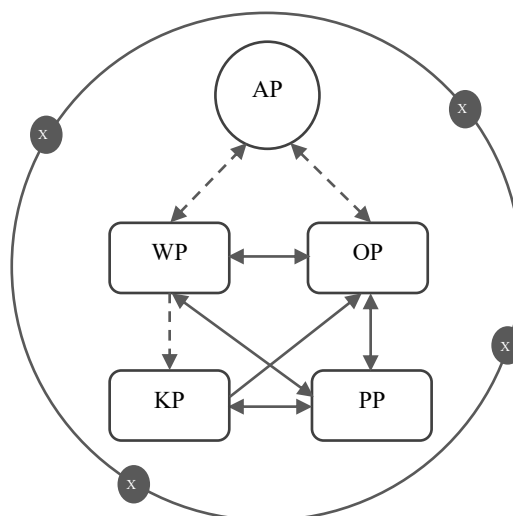
Asymmetric Information Theory

Asymmetric information atau asimetris informasi adalah sebuah kondisi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu “kontrak” memiliki informasi lebih baik (*better informed*) dibanding pihak lainnya (*uninformed*) sehingga dapat memberikan efek yang merugikan (Lofgren et al., 2002). Salah satu efek merugikan tersebut adalah munculnya biaya tambahan (Liu & Wang, 2021). Penyebab utama dari asimetris informasi adalah *informations barriers* atau hambatan informasi yang merupakan kendala dari proses penyebaran informasi (Vaněk & Botlík, 2013). Hambatan informasi tersebut dapat berupa faktor biaya, bahasa, waktu, pengetahuan, komunikasi, dan budaya.

Dalam konteks perpajakan Kristiaji (2013) merumuskan sebuah model konseptual yang menjelaskan jika *asymmetric information* dapat menjadi salah satu pemicu biaya kepatuhan pajak. Gambar 1 menjelaskan hubungan antara wajib pajak (WP) dan otoritas pajak (OP) yang diselimuti kondisi asimetris informasi. Asumsi tersebut dibangun dengan dasar antara kedua belah pihak terjadi perbedaan interpretasi aturan perpajakan (AP), minimnya keterwakilan WP dalam hal perumusan aturan, kompleksnya sistem perpajakan, dan fakta bahwa OP lebih familier dengan aturan secara lebih detail. Kondisi yang demikian menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara WP dan OP yang mana berpotensi menimbulkan *adverse selection* dan *moral hazard*.

Sebagai akibat dari kondisi *asymmetric information* WP akan mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa konsultan pajak (KP) karena KP diasumsikan mempunyai cukup informasi untuk menutup gap informasi antara WP dan OP. Lebih lanjut gap informasi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa pajak yang mana akan mengeskalasi WP ke ranah pengadilan pajak (PP) sehingga berpotensi menimbulkan biaya lain berupa denda dan penalti. Terakhir limpahkan informasi (X) dari beragam sumber dan aktor yang tersebar di publik juga turut berkontribusi menyebabkan *asymmetric information*.

Gambar 1. Hubungan Antara *Asymmetric Information* dan *Tax Compliance Cost*



Sumber: Kristiaji (2013)

Catatan: AP= aturan perpajakan, OP= otoritas pajak, WP= wajib pajak, KP= konsultan pajak, PP= pengadilan pajak X= pihak ke tiga penyumbang asimetris informasi

Penelitian yang dilakukan oleh Rundo dan Di Stallo (2019) menemukan bukti empiris jika asimetris informasi dapat menyebabkan timbulnya biaya tersembunyi yang merugikan salah satu pihak. Biaya tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan antara informasi yang disepakati dan informasi yang diberitahukan. Dalam konteks perpajakan perbedaan interpretasi suatu aturan antara wajib pajak dan otoritas pajak berpotensi menimbulkan biaya tersembunyi. Otoritas pajak yang juga berperan sebagai regulator memiliki informasi yang lebih masif dan jelas akan aturan perpajakan itu sendiri. Sementara dalam proses implementasi aturan tersebut akan menghadapi berbagai macam halangan informasi sehingga berpotensi menimbulkan asimetris informasi. Hal ini pada akhirnya memicu biaya tersembunyi bagi wajib pajak karena wajib pajak harus menanggung asimetris informasi ini dengan membayar jasa konsultan pajak atau membayar denda dan biaya lainnya sebagai akibat dari kesalahan menginterpretasikan suatu aturan perpajakan.

H1: *Asymmetric information* berpengaruh positif terhadap *tax compliance cost*

Tax Knowledge

Tax knowledge atau pengetahuan pajak merujuk pada persepsi seseorang akan tingkat kemampuan mereka memahami dan patuh pada peraturan dibidang perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019). *Tax knowledge* menjadi isu penting yang berkaitan dengan banyak isu perpajakan lain seperti misal *tax compliance* (kepatuhan pajak) dan *tax morale* (moralitas pajak). Banyak hasil penelitian menyimpulkan bahwa meningkatkan *tax knowledge* adalah salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax knowledge* terdiri dari tiga elemen mendasar yaitu pengetahuan umum mengenai pajak (*general tax knowledge*), pengetahuan mengenai aspek hukum perpajakan (*legal tax knowledge*), dan pengetahuan prosedural perpajakan (*procedural tax knowledge*).

Ketiga elemen mendasar ini dapat didorong oleh beragam faktor seperti misal tingkat pendidikan seseorang dan kesadaran akan pajak itu sendiri. Selain itu pemahaman akan konsep dan teknis dari aturan perpajakan juga menjadi faktor krusial. Aturan perpajakan yang sudah jelas sekalipun bahkan masih memiliki potensi untuk diinterpretasikan secara berbeda oleh wajib pajak dan otoritas pajak sesuai kepentingan mereka masing-masing (Bornman & Ramutumbu, 2019). Perbedaan interpretasi ini dapat disebabkan oleh persepsi yang berbeda dari kedua belah pihak. Merujuk pada teori asimetris informasi perbedaan persepsi ini disebabkan oleh hambatan informasi berupa perbedaan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Vaněk & Botlík, 2013). *Asymmetric information* dapat menurun seiring dengan meningkatnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terlibat kontrak (Chen et al., 2013). Maka dari itu meningkatkan pengetahuan pajak diperlukan untuk mengurangi asimetris informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

H2: *Tax knowledge* berpengaruh negatif terhadap *asymmetric information*

Tax Information Media

Tax information media atau media informasi pajak adalah segala bentuk perantara komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan perpajakan (Usman et al., 2019). Penggunaan media seperti gambar, video, atau ilustrasi mampu memberikan gambaran penjelasan yang lebih jelas dibanding media tekstual. Kreator media baik itu otoritas pajak ataupun pihak ketiga dapat menggunakan platform seperti media sosial dan *website* sebagai saluran untuk memperluas cakupan penyebaran informasi yang lebih efektif.

Penggunaan media tertentu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah *asymmetric information* (Usman et al., 2019). Dalam konteks *asymmetric information*, pola komunikasi dapat menjadi halangan informasi. Sehingga semakin variatif media yang digunakan untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan pajak maka kesenjangan informasi akan dapat di minimalkan.

H3: *Tax information media* berpengaruh negatif terhadap *asymmetric information*

Tax Authority Behaviors

Tax authority behaviors atau perilaku otoritas pajak didefinisikan sebagai segala macam bentuk pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang berorientasi pada wajib pajak atau *customer oriented* (Eichfelder & Kegels, 2013). Berdasarkan sudut pandang ini segala informasi yang diberikan

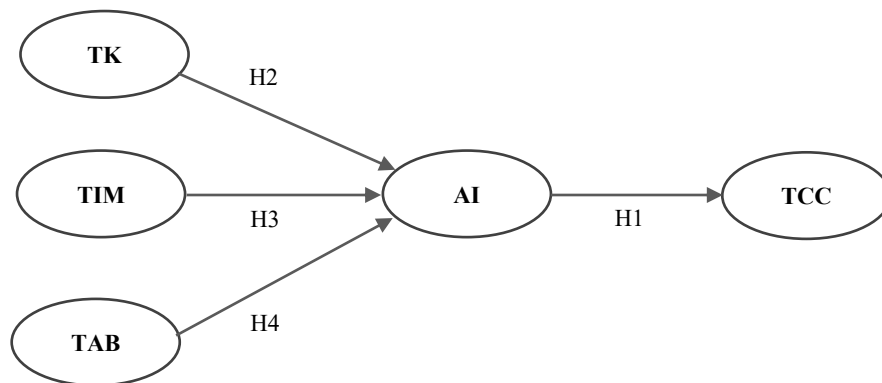
oleh otoritas pajak menjadi suatu bernilai dan berguna bagi wajib pajak. Dalam konteks *asymmetric information* distribusi informasi yang merata kepada semua pihak menjadi salah satu cara menutup kesenjangan informasi yang dimiliki. Sehingga semakin otoritas pajak secara transparan menyampaikan informasi berkaitan dengan aturan perpajakan maka kesenjangan informasi dapat diatasi.

H4: *Tax authority behaviors* berpengaruh negatif terhadap *asymmetric information*

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil studi literatur pada bagian sebelumnya studi ini merumuskan model konseptual sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di bawah. Model konseptual penelitian menggambarkan determinan dari *asymmetric information* dan dampaknya terhadap *tax compliance cost*.

Gambar 2. Model penelitian



Catatan: TK= *tax knowledge*, TIC= *tax information media*, TAB= *tax authority behavior*, AI= *asymmetric information*, TCC= *tax compliance cost*

Sampel Penelitian

Bagian ini membahas mengenai data dan sampel yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Responden dalam studi ini yaitu wajib pajak pribadi yang berprofesi sebagai wirausaha atau pekerja bebas. Alasan yang mendasari pemilihan responden ini adalah pelaporan pajak penghasilan untuk kedua jenis profesi tidak menganut *withholding tax* sehingga relevan digunakan sebagai sampel responden. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *convenience sampling*.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam studi ini terdiri dari lima konstruk. Setiap konstruk diukur menggunakan setidaknya tiga sampai dengan lima indikator yang diadaptasi dan disesuaikan dari penelitian terdahulu. Tabel 1 di bawah menyajikan secara ringkas mengenai item yang digunakan sebagai pengukuran beserta definisi dari masing-masing konstruk.

Tabel 1. Pengukuran Model Penelitian

Variabel	Definisi	Item	Sumber
<i>Tax compliance cost</i>	Biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan dan patuh pada ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> saya bersedia membayar jasa konsultan pajak agar dapat melaporkan pajak dengan lengkap dan benar 	Vincent

Variabel	Definisi	Item	Sumber
	dibidang perpajakan (Musimenta, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • saya menghabiskan banyak waktu untuk melaporkan pajak dengan lengkap dan benar • saya mengeluarkan banyak biaya tambahan untuk melaporkan pajak dengan benar dan lengkap • saya membayar pajak untuk menghindari denda • saya membayar pajak karena besar kemungkinan besar akan terdeteksi tidak patuh pajak • otoritas pajak memiliki informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan saya • otoritas pajak lebih familier mengenai aturan perpajakan jika dibandingkan dengan saya 	(2021); Md Zin et al (2021)
<i>Assymetric information</i>	Kondisi yang mana salah satu pihak dalam kontrak memiliki informasi lebih baik dibanding pihak lainnya (Lofgren et al., 2002)	<ul style="list-style-type: none"> • otoritas pajak lebih paham mengenai aspek teknis perpajakan jika dibandingkan dengan saya • otoritas pajak lebih paham dampak dari aturan perpajakan jika dibandingkan dengan saya • otoritas pajak lebih paham mengenai apa yang menjadi kehendak dari aturan perpajakan jika dibandingkan dengan saya • saya memahami peraturan perpajakan 	Cheng et al (2014)
<i>Tax knowledge</i>	Persepsi seseorang akan tingkat kemampuan mereka memahami dan patuh pada peraturan dibidang perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • saya memahami bahasa yang tertera dalam peraturan perpajakan • saya memahami prosedur pengisian SPT pajak dengan baik • saya memahami cara menghitung pendapatan dan beban • saya memiliki pemahaman pajak yang baik secara umum • sosial media dan website adalah media yang efisien untuk mendapatkan informasi 	Bornman and Ramutumbu (2019)
<i>Tax information media</i>	Segala bentuk perantara komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan perpajakan (Usman et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • sosial media dan website menyediakan informasi terbaru berkaitan dengan perpajakan • sosial media dan website memenuhi kebutuhan informasi perpajakan saya 	Bu et al (2021)
<i>Tax otority behaviour</i>	Segala macam bentuk pelayanan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> • otoritas pajak mampu memberikan jawaban yang presisi 	Eichfelder and Kegels

Variabel	Definisi	Item	Sumber
	oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang berorientasi pada wajib pajak (Eichfelder & Kegels, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • otoritas pajak berpotensi memberikan jawaban yang kontradiktif antara satu dengan lainnya • otoritas pajak memberikan jawaban yang bernilai 	(2013)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah *Partial Least Square Structured Equation Modeling* (PLS SEM). Model PLS SEM berfungsi membantu peneliti membangun model jalur untuk mengestimasi dampak *asymmetric information* terhadap *tax compliance cost* dengan turut mempertimbangkan faktor *tax knowledge*, *tax information channels*, dan *tax authority behaviors*. Model penelitian dalam studi ini masih baru dan belum mapan sehingga membutuhkan lebih banyak eksplorasi. Atas dasar tersebut metode PLS SEM digunakan karena metode ini adalah yang paling sesuai untuk kebutuhan estimasi dan konstruksi teori (Dash & Paul, 2021).

DAFTAR REFERENSI

- Bhalla, N., & Sharma, R. K. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance : A PLS-SEM Analysis. *Sustainability*, 14, 1–18.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Bu, Y., Parkinson, J., & Thaichon, P. (2021). Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism. *Australasian Marketing Journal*, 29(2), 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.01.001>
- Chen, Y., Mak, B., & Li, Z. (2013). Quality deterioration in package tours: The interplay of asymmetric information and reputation. *Tourism Management*, 38, 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.02.010>
- Cheng, K. C., Chen, T. C., & Shih, N. S. (2014). The influence of budgetary participation by R&D managers on product innovation performances: The effect of trust, job satisfaction and information asymmetry. *Asia Pacific Management Review*, 19(2), 133–150. <https://doi.org/10.6126/APMR.2014.19.2.02>
- Dash, G., & Paul, J. (2021). CB-SEM vs PLS-SEM methods for research in social sciences and technology forecasting. *Technological Forecasting and Social Change*, 173(June), 121092. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121092>
- Eichfelder, S., & Kegels, C. (2013). Compliance costs caused by agency action? Empirical evidence and implications for tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 40, 200–219. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.08.012>
- Kristiaji, B. B. (2013). *Asymmetric Information and Its Impact on Tax Compliance Cost in Indonesia : A Conceptual Approach* (Issue 0113). <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/Working-Paper-Asymmetric-Information-Its-Impact-On-Tax-Compliance-Cost-In-Indonesia.pdf>
- Liu, Y., & Wang, X. (2021). Government subsidy , asymmetric information and green innovation innovation. *Kybernetes*. <https://doi.org/10.1108/K-05-2021-0422>
- Lofgren, K., Persson, T., & Weibull, J. W. (2002). Markets with Asymmetric Information: The Contributions of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. *The Scandinavian Journal of*

Economics, 104(2), 195–211. <https://doi.org/10.1111/1467-9442.00280>

- Md Zin, N., Arifin, N., Suzana Kasim, E., Haizam Mohd Saudi, M., Ismail, I., & Selangor Kampus Puncak Alam, C. (2021). Tax compliance for sustainable development by private health practitioners in Malaysia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 16(3).
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Rundo, F., & Di Stallo, A. L. (2019). A Review of the Main Issues on the Loan Contracts : Asymmetric Information , Poor Transparency , and Hidden Costs. *Economies*, 7(91).
- Usman, S. M., Bukhari, F. A. S., Usman, M., Badulescu, D., & Sial, M. S. (2019). Does the role of media and founder's past success mitigate the problem of information asymmetry? Evidence from a UK crowdfunding platform. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/su11030692>
- Vaněk, J., & Botlík, J. (2013). Can Education Help to Reduce Information Asymmetry? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 591–597. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.068>
- Vincent, O. (2021). Assessing SMEs tax non-compliance behaviour in Sub-Saharan Africa (SSA): An insight from Nigeria. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1938930>